



Suara Pemred
Express News

DPRD Bahas Pansus Raperda APBD

PONTIANAK, SP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar.

“Hasil audit BPK sudah kita terima dan hasilnya kita bahas dan dalam hal apa saja yang bisa dilakukan. Intinya

• **Baca Halaman 15**

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI KALBAR,
SURYANSYAH



Hal 9 ■ dprd bahas

kita ingin ada perbaikan ke depannya terhadap keuangan daerah,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suryansyah, Minggu (23/6).

Dari pembahasan tersebut, nantinya, DPRD Kalbar akan memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kalbar terkait dengan pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya.

Sebagai upaya memanfaatkan pembahasan, DPRD Kalbar melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

“Di sini kita bertemu dengan anggota DPRD Semarang dan OPD terkait anggaran, seperti Bappeda dan lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, BPK RI Perwakilan Kalbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2018. Padahal sebelumnya, Kalbar selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi ini sempat menimbulkan polemik di kalangan pemerintahan Pem-

prov Kalbar dan legislator di DPRD Kalbar.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Martinus Sudarno sebelumnya menyebutkan gagalnya Pemprov Kalbar meraih opini WTP tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

“Sebagi kepala daerah, tentunya punya tanggungjawab terhadap hasil keputusan penggunaan anggaran. Ke depan tentunya perlu perhatian serius mengenai masalah ini,” pungkasnya. (jee)